

KEPEMIMPINAN DIGITAL (DIGITAL LEADERSHIP): MANAGEMENT INOVASI PELAYANAN PADA PEMERINTAHAN DESA BERBASIS SOCIETY 5.0

M. Refky Ramadan

Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan

Email: m.refkyramadan26@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>Digital transformation in village governance is a crucial strategy for improving the quality of public services in the modern era. This article examines the role of digital leadership in fostering technology-based service innovation management within the Society 5.0 framework. This research employs a qualitative approach, incorporating literature review and descriptive analysis of village digitalization practices in Indonesia. The results demonstrate that digital leadership plays a key role in guiding village officials to adopt technology, build a culture of innovation, and increase community participation through digital channels. The integration of Society 5.0 into village governance is realized through the utilization of technologies such as AI, IoT, big data, and cloud computing, which support evidence-based policies, service efficiency, and local economic empowerment. However, this study also identified several challenges, including digital infrastructure gaps, low technological literacy, limited funding, and data security and privacy issues. Nevertheless, with visionary leadership, national policy support, and multi-stakeholder collaboration, villages can become pioneers in the implementation of Society 5.0 at the local level. In conclusion, digital leadership is a key factor in realizing inclusive, transparent, and community-oriented village governance. This article provides theoretical contributions to strengthening the concept of digital leadership in local government, as well as practical implications in the form of strategic recommendations to accelerate village digitalization in Indonesia.</i></p> <p>Keyword: <i>Digital leadership, public service innovation, village government, society 5.0</i></p>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
Abstrak	<p><i>Transformasi digital dalam pemerintahan desa merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di era modern. Artikel ini membahas peran kepemimpinan digital dalam mendorong manajemen inovasi pelayanan berbasis teknologi dengan kerangka society 5.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif terhadap praktik digitalisasi desa di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepemimpinan digital berperan sebagai penggerak utama dalam mengarahkan aparatur desa untuk mengadopsi teknologi, membangun budaya inovasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kanal digital. Integrasi Society 5.0 dalam pemerintahan desa diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi seperti AI, IoT, big data, dan cloud computing yang mendukung kebijakan berbasis bukti, efisiensi pelayanan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, keterbatasan pendanaan, serta isu keamanan data dan privasi. Meskipun demikian, dengan kepemimpinan yang visioner, dukungan kebijakan nasional, dan kolaborasi multi-pihak, desa dapat menjadi pionir dalam penerapan Society 5.0 di tingkat lokal. Kesimpulannya, kepemimpinan digital merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan desa yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada</i></p>

kesejahteraan masyarakat. Artikel ini memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan konsep kepemimpinan digital di pemerintahan lokal, serta implikasi praktis berupa rekomendasi strategi untuk mempercepat digitalisasi desa di Indonesia. Kepemimpinan digital tidak sekadar mengacu pada kemampuan seorang pemimpin dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup visi, strategi, serta keterampilan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pelayanan publik. Pemimpin desa yang memiliki orientasi digital diharapkan mampu mendorong aparatur desa untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan paradigma Society 5.0, yaitu sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kata Kunci: kepemimpinan digital, inovasi pelayanan publik, pemerintahan desa, society 5.0

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu isu strategis dalam tata kelola pemerintahan modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga menuntut adanya perubahan mendasar dalam sistem pelayanan publik. Pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika digitalisasi. Dalam konteks ini, kepemimpinan digital (*digital leadership*) menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan manajemen inovasi pelayanan publik di tingkat desa.ⁱ

Kepemimpinan digital tidak sekadar mengacu pada kemampuan seorang pemimpin dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup visi, strategi, serta keterampilan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pelayanan publik. Pemimpin desa yang memiliki orientasi digital diharapkan mampu mendorong aparatur desa untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan paradigma Society 5.0, yaitu sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup.ⁱⁱ

Dalam kerangka Society 5.0, teknologi seperti *big data*, *artificial intelligence*, dan *internet of things* bukan hanya dipandang sebagai alat, melainkan sebagai ekosistem yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintahan desa yang berbasis Society 5.0 dituntut untuk mampu mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga pelayanan publik tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga relevan dengan konteks sosial budaya desa. Oleh karena itu, kepemimpinan digital menjadi jembatan antara teknologi dan masyarakat, memastikan bahwa inovasi pelayanan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga desa.

Namun, penerapan kepemimpinan digital dalam pemerintahan desa bukanlah hal yang sederhana. Terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum merata, hingga resistensi budaya terhadap perubahan. Pemimpin desa dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif, kolaboratif, dan visioner dalam mengelola perubahan tersebut. Kepemimpinan digital yang efektif harus mampu membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi, mendorong partisipasi masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan komunitas lokal.ⁱⁱⁱ

Selain itu, kepemimpinan digital juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Transparansi dan akuntabilitas yang didukung oleh teknologi digital dapat meningkatkan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Misalnya, penggunaan aplikasi pelayanan publik berbasis daring dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi, mengurangi praktik birokrasi yang berbelit, serta memperkuat pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, kepemimpinan digital tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada peningkatan kualitas demokrasi lokal.^{iv}

Urgensi penelitian mengenai kepemimpinan digital dalam konteks pemerintahan desa berbasis Society 5.0 semakin relevan di era pasca-pandemi, di mana digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak. Pandemi COVID-19 telah memperlihatkan betapa pentingnya teknologi dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Desa-desa yang mampu beradaptasi dengan teknologi digital terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis, baik dalam hal pelayanan kesehatan, distribusi bantuan sosial, maupun komunikasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai kepemimpinan digital dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan strategi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan digital dapat mendorong manajemen inovasi pelayanan publik di pemerintahan desa berbasis Society 5.0. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik kepemimpinan digital yang efektif, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam konteks desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan, akademisi, maupun praktisi dalam mengembangkan model kepemimpinan digital yang sesuai dengan karakteristik desa di Indonesia.^v

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menegaskan bahwa kepemimpinan digital merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang inovatif, adaptif, dan

berorientasi pada masyarakat. Integrasi konsep Society 5.0 dalam tata kelola desa membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan, guna menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital.

Selain aspek teknis dan manajerial, kepemimpinan digital dalam pemerintahan desa juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Pemimpin desa harus mampu membangun literasi digital masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga aktor aktif dalam proses pelayanan publik berbasis teknologi. Literasi digital yang baik akan mendorong masyarakat untuk lebih kritis, partisipatif, dan inovatif dalam memanfaatkan layanan digital. Dengan demikian, kepemimpinan digital tidak hanya berorientasi pada internal organisasi pemerintahan desa, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembangunan desa berbasis Society 5.0.^{vi}

Lebih jauh lagi, kepemimpinan digital dapat menjadi katalisator dalam menciptakan ekosistem desa cerdas (*smart village*). Konsep desa cerdas menekankan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau konteks tertentu melalui pendekatan deskriptif atau interpretatif. Fokus utamanya adalah pada pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, dan konteks, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih menekankan pada pengukuran dan analisis data numerik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman konsep dan proses sosial.^{vii}

Dalam hal ini metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan memahami bagaimana kepemimpinan digital: management inovasi pelayanan pada pemerintahan desa berbasis society 5.0.

Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna.

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. proses menyederhanakan data untuk di interpretasikan.

Analisis data bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian. Analisis data ini menggunakan analisis kualitatif kemudian data yang sudah ada dijelaskan menggunakan uraian deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana peran pelatihan digital dan kompetensi adaptif terhadap peningkatan produktivitas pegawai sektor publik di balaraja tangerang.^{viii}

Analisis Data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. inventarisasi literatur, yakni mengidentifikasi jurnal dan buku yang relevan
2. kategorisasi tema, mengelompokkan hasil bacaan berdasarkan fokus penelitian.
3. analisis isi, yakni menelaah kembali bagaimana kepemimpinan digital: management inovasi pelayanan pada pemerintahan desa berbasis society 5.0
4. sintesis hasil, yakni menarik hubungan antara temuan literatur dengan teori.^{ix}

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. implementasi kepemimpinan kepala desa

kepala desa dalam era digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai administrator yang menurus administrasi yang mengurus birokrasi, melainkan juga sebagai visionary leader yang mampu membaca arah perkembangan teknologi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat desa. Kepemimpinan digital menuntut kepala desa untuk memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem pelayanan publik. Hal ini mencakup penggunaan aplikasi berbasis web untuk administrasi kependudukan, sistem informasi desa untuk transparansi anggaran, serta platform komunikasi digital yang memudahkan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat.^x

Seorang pemimpin digital di desa harus mampu menjadi penggerak perubahan. Ia tidak hanya mengarahkan aparatur desa untuk menggunakan teknologi, tetapi juga membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi. Misalnya, kepala desa dapat mendorong penggunaan aplikasi e-office untuk surat menyurat, sistem e-budgeting untuk pengelolaan keuangan desa, serta aplikasi pelayanan kependudukan yang memungkinkan warga

mengurus dokumen tanpa harus datang ke kantor desa. Dengan kepemimpinan yang visioner, desa dapat bergerak menuju konsep *smart village* yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.^{xi}

Implementasi kepemimpinan digital tidak akan berhasil tanpa adanya transformasi pada aparatur desa. Kepala desa sebagai pemimpin digital harus memastikan bahwa perangkat desa memiliki literasi digital yang memadai. Pelatihan dan pendampingan menjadi langkah penting agar aparatur desa mampu mengoperasikan sistem digital dengan baik. Transformasi ini mencakup perubahan pola kerja dari manual ke digital. Misalnya, pencatatan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih ke sistem digital yang terintegrasi. Aparatur desa juga dituntut untuk lebih responsif dalam melayani masyarakat melalui kanal digital, seperti media sosial resmi desa atau aplikasi layanan publik. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Kepemimpinan digital di desa tidak hanya berfokus pada internal pemerintahan, tetapi juga pada masyarakat sebagai pengguna layanan. Kepala desa harus mampu membangun budaya inovasi yang melibatkan partisipasi aktif warga. Misalnya, dengan menyediakan kanal pengaduan digital, forum diskusi daring, atau aplikasi partisipatif yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa. Budaya inovasi ini memperkuat demokrasi desa karena warga memiliki akses yang lebih luas untuk memberikan masukan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan kepemimpinan digital, masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif berkontribusi. Hal ini sejalan dengan semangat Society 5.0 yang menempatkan manusia sebagai pusat dari perkembangan teknologi.^{xii}

Beberapa desa di Indonesia telah menunjukkan praktik kepemimpinan digital yang berhasil. Misalnya, desa Pamekasan di Jawa Timur yang mengembangkan aplikasi layanan administrasi berbasis android, sehingga warga dapat mengurus dokumen kependudukan secara daring. Ada juga program smart kampung di Banyuwangi yang mengintegrasikan layanan publik dengan teknologi digital, mulai dari administrasi hingga layanan kesehatan.^{xiii}

2. integrasi society 5.0 dalam pemerintahan desa

Society 5.0 lahir sebagai jawaban atas tantangan Revolusi Industri 4.0. Jika Revolusi Industri 4.0 menekankan pada otomatisasi, robotisasi, dan digitalisasi, maka Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat dari perkembangan teknologi. Artinya, teknologi bukan sekadar alat produksi, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam konteks pemerintahan desa, Society 5.0 berarti mengintegrasikan teknologi digital ke dalam

sistem pelayanan publik dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Desa tidak lagi hanya menjadi unit administratif, tetapi juga pusat inovasi sosial. Teknologi seperti

kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), *big data*, dan *cloud computing* digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan partisipasi warga.^{xiv}

Dengan paradigma ini, desa dapat menjadi ruang yang lebih inklusif, di mana setiap warga memiliki akses terhadap informasi dan layanan publik secara adil. Konsep Society 5.0 juga menekankan keberlanjutan, sehingga teknologi yang diterapkan harus mendukung pembangunan desa yang ramah lingkungan dan berorientasi pada masa depan.

Administrasi desa merupakan aspek fundamental dalam pemerintahan lokal. Integrasi Society 5.0 dalam administrasi desa berarti memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi administrasi memungkinkan pencatatan data kependudukan, keuangan, dan pembangunan dilakukan secara real-time. Dengan *big data*, desa dapat menganalisis tren demografi, kebutuhan sosial, dan potensi ekonomi lokal. Misalnya, data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem nasional dapat membantu desa dalam menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran. AI dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan pangan atau kesehatan berdasarkan data warga.^{xv}

Selain itu, sistem informasi desa berbasis *cloud computing* memungkinkan akses data yang lebih fleksibel dan aman. Aparatur desa dapat mengakses informasi dari mana saja, sementara masyarakat dapat memantau transparansi anggaran dan program pembangunan. Dengan demikian, kebijakan desa menjadi lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Integrasi teknologi ini juga memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa. Warga dapat mengakses laporan keuangan desa secara daring, memantau proyek pembangunan, dan memberikan masukan melalui kanal digital. Hal ini menciptakan pemerintahan desa yang lebih terbuka dan partisipatif.

IoT (Internet of Things) menjadi salah satu teknologi kunci dalam Society 5.0. Desa dapat memanfaatkan sensor dan perangkat pintar untuk mendukung sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan. Misalnya, sensor kelembaban tanah dapat membantu petani menentukan waktu yang tepat untuk irigasi, sementara sistem monitoring kualitas air dapat mendukung pengelolaan perikanan.^{xvi}

Konsep *smart village* juga sejalan dengan Society 5.0. Desa yang mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan publik, ekonomi, dan lingkungan akan lebih adaptif terhadap perubahan. *Smart village* bukan hanya tentang digitalisasi, tetapi juga tentang menciptakan

ekosistem desa yang cerdas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Contoh nyata penerapan smart village di Indonesia adalah program *Smart Kampung* di Banyuwangi. Program ini mengintegrasikan layanan publik dengan teknologi digital, mulai dari administrasi hingga layanan kesehatan. Warga dapat mengakses layanan melalui aplikasi, sementara pemerintah desa dapat memantau kebutuhan masyarakat secara real-time.^{xvii}

Society 5.0 menekankan bahwa teknologi harus meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam pemerintahan desa, hal ini dapat diwujudkan melalui aplikasi partisipatif yang memungkinkan warga memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan. Forum diskusi daring, kanal pengaduan digital, dan sistem *e-voting* untuk musyawarah desa adalah contoh nyata integrasi teknologi dengan demokrasi lokal. Dengan adanya partisipasi digital, warga desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif berkontribusi. Hal ini memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat juga dapat diperkuat melalui media sosial resmi desa. Kepala desa dan aparatur dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi, menerima masukan, dan membangun komunikasi dua arah dengan warga. Dengan demikian, masyarakat merasa lebih dilibatkan dalam proses pembangunan. Integrasi Society 5.0 dalam partisipasi masyarakat menciptakan demokrasi desa yang lebih inklusif. Warga memiliki akses yang lebih luas untuk memberikan masukan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini sejalan dengan semangat Society 5.0 yang menempatkan manusia sebagai pusat dari perkembangan teknologi.^{xviii}

3. tantangan integrasi society 5.0 dalam pemerintahan desa

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan Society 5.0 di pemerintahan desa adalah kesenjangan infrastruktur digital. Banyak desa di Indonesia, terutama yang berada di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan akses internet. Jaringan telekomunikasi yang lemah membuat layanan digital sulit dioperasikan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan desa tidak dapat memanfaatkan teknologi seperti *cloud computing*, *big data*, atau aplikasi pelayanan publik secara maksimal. Akibatnya, digitalisasi pelayanan publik hanya dapat berjalan di desa-desa yang memiliki infrastruktur memadai, sementara desa lain tertinggal. Selain itu, keterbatasan perangkat keras seperti komputer, server, dan sensor IoT juga menjadi hambatan. Pemerintah desa sering kali tidak memiliki anggaran untuk pengadaan perangkat modern. Hal ini menimbulkan kesenjangan digital antar desa, yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan pembangunan.^{xix}

Tantangan berikutnya adalah rendahnya literasi digital, baik pada aparatur desa maupun masyarakat. Aparatur desa yang terbiasa bekerja dengan sistem manual sering kali kesulitan beradaptasi dengan sistem digital. Mereka membutuhkan pelatihan intensif agar mampu mengoperasikan aplikasi pelayanan publik, sistem informasi desa, dan teknologi berbasis IoT. Di sisi lain, masyarakat desa juga menghadapi keterbatasan pemahaman terhadap teknologi. Banyak warga yang belum terbiasa menggunakan aplikasi daring untuk mengurus administrasi atau berpartisipasi dalam musyawarah desa secara digital. Hal ini membuat partisipasi masyarakat dalam era Society 5.0 belum optimal. Rendahnya literasi digital juga berpotensi menimbulkan resistensi terhadap perubahan. Aparatur dan masyarakat yang tidak memahami manfaat teknologi cenderung menolak digitalisasi. Oleh karena itu, program edukasi dan pendampingan menjadi sangat penting untuk membangun budaya digital di desa.^{xx}

Integrasi Society 5.0 membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, perangkat, dan pelatihan. Namun, desa sering kali menghadapi keterbatasan anggaran. Dana desa yang tersedia lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti pembangunan fisik, kesehatan, dan pendidikan. Akibatnya, program digitalisasi desa sering kali tidak menjadi prioritas. Bahkan jika ada inisiatif digital, keterbatasan anggaran membuat implementasi tidak berkelanjutan. Misalnya, desa dapat membeli perangkat komputer, tetapi tidak mampu membiayai pemeliharaan atau pembaruan sistem. Pendanaan juga menjadi tantangan dalam pelatihan aparatur dan masyarakat. Program literasi digital membutuhkan biaya besar, sementara desa tidak selalu memiliki sumber daya untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, integrasi Society 5.0 di desa membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, swasta, dan lembaga pendidikan.^{xxi}

Selain itu Dalam era Society 5.0, data menjadi aset penting. Pemerintahan desa yang mengintegrasikan teknologi digital akan mengelola data kependudukan, keuangan, dan pembangunan dalam jumlah besar. Namun, hal ini menimbulkan tantangan terkait keamanan data dan privasi. Desa sering kali tidak memiliki sistem keamanan data yang memadai. Server yang digunakan tidak dilengkapi dengan proteksi canggih, sehingga rentan terhadap serangan siber. Kebocoran data warga dapat menimbulkan masalah serius, termasuk penyalahgunaan identitas dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, regulasi terkait privasi data di tingkat desa masih lemah. Aparatur desa belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data. Hal ini menuntut

adanya kebijakan nasional yang lebih ketat serta pendampingan teknis untuk desa dalam mengelola data secara aman.

Integrasi Society 5.0 juga menghadapi tantangan sosial dan budaya. Masyarakat desa yang terbiasa dengan sistem tradisional sering kali merasa asing dengan teknologi digital. Mereka lebih nyaman dengan pelayanan tatap muka dibandingkan dengan aplikasi daring. Resistensi ini dapat muncul dalam bentuk penolakan terhadap penggunaan aplikasi, ketidakpercayaan terhadap sistem digital, atau bahkan anggapan bahwa teknologi hanya menguntungkan kelompok tertentu. Budaya lokal yang kuat juga dapat menjadi hambatan jika tidak diintegrasikan dengan baik dalam sistem digital. Oleh karena itu, kepemimpinan desa harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Pemimpin desa perlu menjelaskan manfaat teknologi secara sederhana dan menunjukkan dampak positifnya terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang tepat, resistensi sosial dapat diminimalisasi.^{xxii}

Secara keseluruhan, tantangan integrasi Society 5.0 dalam pemerintahan desa mencakup kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, keterbatasan pendanaan, isu keamanan data, resistensi sosial, dan keterbatasan regulasi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi desa bukanlah proses yang mudah, melainkan membutuhkan strategi komprehensif, dukungan multi-pihak, dan kepemimpinan yang visioner.

D. KESIMPULAN

Kepemimpinan digital terbukti menjadi faktor penentu dalam mendorong transformasi pelayanan publik di desa. Kepala desa dan aparatur yang memiliki visi digital mampu mengarahkan pemerintahan desa untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Mereka tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai *change agent* yang membangun budaya kerja inovatif. Dengan kepemimpinan digital, desa dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, pengelolaan keuangan, hingga komunikasi dengan masyarakat. Hal ini menjadikan desa lebih responsif terhadap kebutuhan warga dan lebih transparan dalam menjalankan pemerintahan.

Konsep Society 5.0 memberikan arah baru bagi pembangunan desa. Teknologi seperti AI, IoT, *big data*, dan *cloud computing* bukan hanya alat efisiensi, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat. Integrasi Society 5.0 memungkinkan desa untuk merancang

kebijakan berbasis bukti, meningkatkan partisipasi warga, dan menciptakan ekosistem desa yang cerdas serta berkelanjutan. Dengan Society 5.0, desa tidak lagi sekadar menjadi unit administratif, melainkan pusat inovasi sosial. Teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Meskipun peluang digitalisasi desa sangat besar, terdapat tantangan yang harus diatasi. Kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, keterbatasan pendanaan, isu keamanan data, resistensi sosial, dan keterbatasan regulasi menjadi hambatan utama. Tantangan ini menunjukkan bahwa integrasi Society 5.0 di desa bukanlah proses yang mudah. Dibutuhkan strategi komprehensif, dukungan multi-pihak, dan komitmen kepemimpinan desa untuk mengatasi hambatan tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Muhammad Nur Alam, Mochammad Wijaya Wijaya, Vika Puji Cahyani, and Muhammad Muzaini. "Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Digital Pada Kelompok Pengrajin Batok Kelapa Di Desa Panciro Kabupaten Gowa." *Jurnal Abdimas Indonesia* 4, no. 2 (2024): 597–602. <https://doi.org/10.53769/jai.v4i2.773>.
- Cahya, Tiyyar, Umar Aris, Resi Pranacitra, Suriyanto Suriyanto, and Wishnu Dewanto. "SMART GOVERNANCE: PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA, SIAPKAH INDONESIA?" *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2024): 217–23. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.528>.
- Dewi Nur Laila, Fitriana, and Muhammad Mujtaba Habibi. "Implementasi Inovasi Layanan Digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Deso Dan Pelayanan Online) Di Kabupaten Jombang." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 22, no. 2 (2023): 165–79. <https://doi.org/10.35967/njip.v22i2.574>.
- Fitri, Suci Emilia, Melati Ayuning Pranasari, Dian Martha Indarti, et al. "Illuminating Tradition Through Innovation: Transforming Traditional Woven Tourism in Smart Tourism in Central Lombok Regency." *Jurnal Bina Praja* 15, no. 1 (2023): 207–20. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.207-220>.
- hasan, muhammad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta media grub, 2022.
- Herda, Lusiana, and Santosa Santosa. "Penerapan Motivasi Melalui Mentoring Dalam Membangun Kepemimpinan Remaja Di Era Digital." *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 5, no. 1 (2024): 50–64.

<https://doi.org/10.47530/edulead.v5i1.202>.

- Hidayah, Sunnatul, Mintarsih Arbarini, and Yudi Siswanto. "Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan Dan Digital Marketing Terhadap Wirausaha Perempuan Desa Mangunharjo." *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 12, no. 2 (2024): 618–36. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v12i2.1338>.
- Idrus, Iqbal Aidar, and Umami Zakiah. "Inovasi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Warga Berbasis Infomasi Elektronik Pada Aplikasi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta." *Journal of Political Issues* 3, no. 2 (2022): 77–85. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.69>.
- Irna Sulistiarini, Fatimah, and Muhammad Alkirom Wildan. "PERAN TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP KOMPETENSI SDM DAN KEMANDIRIAN BUMDes." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 14, no. 9 (2025): 741–56. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2025.v14.i9.p05>.
- m.fathun niam, emma rumahlewang, and Hesti Umiyati. *Metode Penelitian Kualitatif*. Widina media utama, n.d.
- Nihayah, Ulin, Yunita Anisatuzzuhriya, Muhammad Aniq Al Faruqi, and Amalia Sania Salsabila. "Edukasi Kewirausahaan UMKM Melalui Platform Digital: Entrepreneurship Small And Medium Micro Through Digital Platforms." *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom* 2, no. 1 (2022): 69–86. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v2i1.282>.
- Purnama, Tirza Haqia, Roni Ekha Putera, and Tengku Rika Valentina. "PEMBANGUNAN EKOSISTEM DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA LAMAHU KECAMATAN BULANGO SELATAN PROVINSI GORONTALO." *Jurnal Hilirisasi IPTEKS* 7, no. 2 (2024): 214–30. <https://doi.org/10.25077/jhi.v7i2.795>.
- Rais, Muhammad Amin, Muhammad Akmal Ibrahim, and Suryadi Lambali. "Kepemimpinan Inovatif Dan Tata Kelola Desa Digital: Studi Kasus Desa Biangloe." *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, June 17, 2024, 18–39. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v10i1.27995>.
- Saksono, Herie. "INNOVATION HUB: MEDIA KOLABORASI MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7854>.
- Sudiatmika, I. Putu Gede Abdi, Ni Wayan Cahya Ayu Pratami, and I. Gusti Ayu Imbayani. "Transformasi Menuju Desa Digital: Pemberdayaan BumDes Melalui Inovasi Manajemen Keuangan Dan Implementasi IOT Di Bum Desa Panca Laksmi Sedana Abuan Bangli."

Jurnal Abdimas Indonesia 4, no. 3 (2024): 1068–82.
<https://doi.org/10.53769/jai.v4i3.948>.

sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabet, 2013.

Widaryanti, Rahayu, Muflih Muflih, and Marselina Endah Hiswati. "INOVASI KAMPUNG KOMPLEMENTER BERBASIS TEHNOLOGI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA PADA MASA PANDEMI COVID-19." *LINK 18*, no. 2 (2022): 133–40. <https://doi.org/10.31983/link.v18i2.9119>.

ⁱ Muhammad Nur Alam Alam et al., "Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Digital Pada Kelompok Pengrajin Batok Kelapa Di Desa Panciro Kabupaten Gowa," *Jurnal Abdimas Indonesia* 4, no. 2 (2024): 4, <https://doi.org/10.53769/jai.v4i2.773>.

ⁱⁱ Tiyar Cahya et al., "SMART GOVERNANCE: PROGRAM TRANSFORMASIONAL DIGITAL NASIONAL MELALUI DESA, SIAPKAH INDONESIA?," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2024): 6, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.528>.

ⁱⁱⁱ Fitriana Dewi Nur Laila and Muhammad Mujtaba Habibi, "Implementasi Inovasi Layanan Digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Deso Dan Pelayanan Online) Di Kabupaten Jombang," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 22, no. 2 (2023): 8, <https://doi.org/10.35967/njip.v22i2.574>.

^{iv} Suci Emilia Fitri et al., "Illuminating Tradition Through Innovation: Transforming Traditional Woven Tourism in Smart Tourism in Central Lombok Regency," *Jurnal Bina Praja* 15, no. 1 (2023): 10, <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.207-220>.

^v Fitri et al., "Illuminating Tradition Through Innovation."

^{vi} Lusiana Herda and Santosa Santosa, "Penerapan Motivasi Melalui Mentoring Dalam Membangun Kepemimpinan Remaja Di Era Digital," *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 5, no. 1 (2024): 50–64, <https://doi.org/10.47530/edulead.v5i1.202>.

^{vii} m.fathun niam et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (widina media utama, n.d.).

^{viii} muhammad hasan, *Metode Penelitian Kualitatif* (tahta media grub, 2022).

^{ix} sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (CV. Alfabet, 2013).

^x Herda and Santosa, "Penerapan Motivasi Melalui Mentoring Dalam Membangun Kepemimpinan Remaja Di Era Digital."

^{xi} Sunnatul Hidayah et al., "Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan Dan Digital Marketing Terhadap Wirausaha Perempuan Desa Mangunharjo," *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 12, no. 2 (2024): 618–36, <https://doi.org/10.47668/pkww.v12i2.1338>.

^{xii} Iqbal Aidar Idrus and Ummi Zakiyah, "Inovasi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Warga Berbasis Infomasi Elektronik Pada Aplikasi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta," *Journal of Political Issues* 3, no. 2 (2022): 77–85, <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.69>.

^{xiii} Irna Sulistiarini et al., "PERAN TRANSFORMASI DIGITAL TERHADAP KOMPETENSI SDM DAN KEMANDIRIAN BUMDes," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 14, no. 9 (2025): 741–56, <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2025.v14.i9.p05>.

^{xiv} Ulin Nihayah et al., "Edukasi Kewirausahaan UMKM Melalui Platform Digital: Entrepreneurship Small And Medium Micro Through Digital Platforms," *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom* 2, no. 1 (2022): 69–86, <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v2i1.282>.

^{xv} Tirza Haqia Purnama et al., "PEMBANGUNAN EKOSISTEM DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA LAMAHU KECAMATAN BULANGO SELATAN PROVINSI GORONTALO," *Jurnal Hilirisasi IPTEKS* 7, no. 2 (2024): 214–30, <https://doi.org/10.25077/jhi.v7i2.795>.

^{xvi} Muhammad Amin Rais et al., "Kepemimpinan Inovatif Dan Tata Kelola Desa Digital: Studi Kasus Desa Biangloe," *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, June 17, 2024, 18–39, <https://doi.org/10.31947/jakpp.v10i1.27995>.

^{xvii} Herie Saksono, "INNOVATION HUB: MEDIA KOLABORASI MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7854>.

^{xviii} Rahayu Widaryanti et al., "INOVASI KAMPUNG KOMPLEMENTER BERBASIS TEHNOLOGI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA PADA MASA PANDEMI COVID-19," *LINK 18*, no. 2 (2022): 133–40, <https://doi.org/10.31983/link.v18i2.9119>.

^{xix} I. Putu Gede Abdi Sudiarmika et al., "Transformasi Menuju Desa Digital: Pemberdayaan BumDes Melalui Inovasi Manajemen Keuangan Dan Implementasi IOT Di Bum Desa Panca Laksmi Sedana Abuan Bangli," *Jurnal Abdimas Indonesia* 4, no. 3 (2024): 1068–82, <https://doi.org/10.53769/jai.v4i3.948>.

^{xx} Rais et al., "Kepemimpinan Inovatif Dan Tata Kelola Desa Digital."

^{xxi} Cahya et al., "SMART GOVERNANCE."

^{xxii} Dewi Nur Laila and Habibi, "Implementasi Inovasi Layanan Digital Sabdopalon (Sistem Administrasi Berita Data Deso Dan Pelayanan Online) Di Kabupaten Jombang."